

ANALISIS SISTEM PENGANGGARAN DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAERAH DI KABUPATEN YAHUKIMO

SIMRI

MAGISTER MANAJEMEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penganggaran dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Yahukimo. Fokus penelitian diarahkan pada proses penyusunan anggaran, implementasi program, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi penguatan sistem. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Informan ditentukan secara purposive sebanyak 8 aparatur teknis pada Dinas Ketahanan Pangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penganggaran telah mengacu pada dokumen perencanaan formal, namun menghadapi kendala fluktuasi alokasi anggaran yang sangat tajam dari tahun 2023 hingga 2026. Hambatan utama meliputi keterbatasan kapasitas fiskal daerah, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan data komoditas pangan, serta kondisi geografis wilayah pegunungan Papua yang ekstrem. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan integrasi perencanaan-penganggaran, standarisasi data sektoral, serta monitoring berbasis kinerja.

Kata Kunci: Sistem penganggaran, ketahanan pangan, pemerintah daerah, Yahukimo.

I. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional yang menentukan keberlanjutan hidup masyarakat, stabilitas ekonomi, dan ketahanan sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan. Dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan sektor ini sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia menempatkan sektor pangan sebagai prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Namun, pelaksanaannya di tingkat sub-nasional menghadapi tantangan nyata. Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan memiliki karakteristik geografis yang sangat kompleks. Wilayahnya didominasi pegunungan dengan akses logistik yang sangat terbatas, sehingga memicu tingginya biaya distribusi bahan pangan dan ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Secara empiris, komitmen pendanaan sektor ketahanan pangan di Kabupaten Yahukimo mengalami fluktuasi yang tidak konsisten dalam empat tahun terakhir. Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran tercatat hanya Rp700 juta, lalu melonjak drastis hingga Rp5 miliar pada tahun 2024 (>614%). Namun, pendanaan meluncur turun menjadi Rp3 bahkan miliar pada tahun 2025 dan tersisa Rp1,3 miliar pada tahun 2026. Fenomena ketidakpastian fiskal jangka menengah ini mengindikasikan bahwa sistem penganggaran belum sepenuhnya bersandar pada perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Research gap penelitian ini terletak pada keterbatasan studi terdahulu yang mayoritas menggunakan pendekatan kuantitatif makro untuk menilai efisiensi fiskal. Riset-riset tersebut belum mengeksplorasi secara kualitatif dinamika integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah dengan kendala hambatan geografis ekstrem. Oleh karena itu, *novelty* (kebaruan) riset ini berfokus pada pengembangan model keterpaduan sistem

anggaran pada wilayah pegunungan Papua guna menjawab tiga rumusan masalah: proses sistem perencanaan-penganggaran, faktor pendorong/penghambat, serta strategi penguatannya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif guna mendalami secara naturalistik realitas tata kelola keuangan publik. Penelitian dilaksanakan secara spesifik pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo. Pemilihan informan menerapkan teknik *purposive sampling* dengan menetapkan 8 informan kunci yang menguasai siklus teknis penganggaran. Komposisi informan mencakup Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, hingga Staf Teknis terkait.

Data dikumpulkan melalui tiga metode simultan: observasi terhadap aktivitas penyusunan anggaran, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap naskah regulasi serta laporan formal seperti RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, DPA, APBD, dan LAKIP. Keabsahan data diuji menggunakan asas *trustworthiness* yang meliputi pengujian kredibilitas (melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu), transferabilitas, dependabilitas (audit seluruh rekam jejak riset), serta konfirmabilitas. Penafsiran data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan inti: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Hasil penelitian di lapangan membuktikan bahwa secara administratif prosedural, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo telah menyusun Rencana Kerja (Renja)

tahunan yang disinkronisasikan ke dalam dokumen RKPD dan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Namun, pada tahap pengalokasian anggaran, keputusan akhir besaran dana (*pagu definitif*) sangat ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan dinamika pendapatan daerah, bukan berdasarkan prioritas usulan teknis program.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap inkonsistensi pelaksanaan program kerja di lapangan. Berikut adalah rangkuman visual realitas fluktuasi fiskal sektor pangan daerah:

Tabel 1. Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan Kabupaten Yahukimo

Tahun Anggaran	Nilai Pagu Anggaran (Rp)	Dampak terhadap Kontinuitas Program
2023	700.000.000	Pendanaan minim, program terbatas pada inisiasi awal
2024	5.000.000.000	Lonjakan drastis, ekspansi bantuan sarana pertanian
2025	3.000.000.000	Kontraksi anggaran, pengurangan volume paket bantuan
2026	1.300.000.000	Pemangkasan tajam, penghentian sebagian program pemberdayaan

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Inkonsistensi alokasi ini menghambat keberlanjutan program strategis seperti diversifikasi pangan, pengembangan cadangan pangan lokal, dan kampanye konsumsi B2SA. Ketika pasokan dana merosot tajam pada tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan terpaksa memprioritaskan belanja aparatur dan operasional kantor, sehingga memotong porsi belanja publik untuk masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Sistem Penganggaran

Berdasarkan kondensasi hasil analisis gabungan delapan informan, diidentifikasi beberapa faktor penentu sebagai berikut:

- **Faktor Pendukung:** Komitmen pimpinan organisasi yang kuat dalam mengawal usulan program, ketersediaan payung regulasi formal yang jelas (UU Pangan, PP No. 12 Tahun 2019), serta loyalitas aparatur perencanaan dinas.
- **Faktor Penghambat:** Keterbatasan kapasitas fiskal daerah akibat ketergantungan yang terlampau tinggi pada dana transfer pusat (DAU/DAK), lemahnya sistem integrasi basis data pangan antar-instansi, ego sektoral atau kurang optimalnya koordinasi lintas OPD (Bappeda, Keuangan, Pertanian), serta kendala iklim dan hambatan geografis pegunungan Papua yang melambungkan biaya operasional logistik pengiriman material.

3. Diskusi Perspektif Teoretis

Dalam kacamata *Grand Theory* penelitian ini, yaitu *New Public Governance* (NPG) dari Stephen P. Osborne, tata kelola pemerintahan dituntut bergerak kolaboratif melalui pelibatan jaringan aktor (*network governance*) untuk menciptakan kemanfaatan bersama (*public value*). Realitas di Kabupaten Yahukimo menunjukkan tata kelola penganggaran pangan masih berjalan secara parsial dan silo-sektoral. Sinergi kerja antara Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian dalam mengelola rantai produksi-distribusi belum terikat dalam satu sistem koordinasi yang harmonis.

Ditinjau dari *Middle Theory* penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting Theory*), pengalokasian dana idealnya wajib dikaitkan secara linier dengan target capaian luaran (*output*) dan dampak (*outcome*) pembangunan. Namun, fluktuasi ekstrem pada Tabel 1 menegaskan bahwa sistem anggaran sektor pangan di Yahukimo masih didominasi oleh pendekatan ketersediaan dana jangka pendek

(*incremental/administrative approach*) daripada kepastian pencapaian ketahanan pangan daerah jangka panjang secara berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Sistem penganggaran ketahanan pangan di Kabupaten Yahukimo secara normatif administratif telah memenuhi prosedur siklus keuangan daerah. Kendati demikian, efektivitas substansialnya masih rendah akibat fluktuasi fiskal tahunan yang sangat tajam periode 2023–2026, sehingga mengorbankan kesinambungan program kerja di lapangan. Kelemahan ini dipicu oleh rendahnya kemandirian fiskal daerah, kurangnya sinkronisasi program lintas sektor, kelemahan akurasi data komoditas pangan, serta rintangan geografis wilayah pegunungan Papua.

Arah strategi penguatan yang direkomendasikan adalah: (1) Mengunci batas bawah persentase anggaran (*earmarked funding*) khusus sektor pangan dalam APBD demi menjaga keberlanjutan program dari dampak fluktuasi fiskal; (2) Membangun wadah koordinasi terpadu lintas sektor (Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Keuangan) sesuai marwah *New Public Governance*; dan (3) Mengembangkan pusat data pangan sektoral yang terintegrasi sebagai landasan ilmiah penganggaran berbasis bukti (*evidence-based budgeting*).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2025). *Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Faisal, Adriansyah, & Nurlina. (2025). *Tekanan Fiskal dan Fragmentasi Anggaran Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah 2023–2025*. *STIE AMKOP Journal*, 12(1), 30-45.
- FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Osborne, S. P. (2021). *The New Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
- Robinson, M. (2023). *Performance-Based Budgeting: Concept and Practice*. Washington D.C.: IMF.